

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan UKM di Indonesia sampai saat ini tidak terlepas dari bantuan perbankan dalam memberikan penyaluran kredit bagi para pelaku UMKM. Berdasarkan surat Edaran Bank Indonesia No.17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.215/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan Bank Umum menyusun rencana pemberian kredit atau pembiayaan UKM dengan memperhatikan tahapan pencapaian rasio kredit atau pembiayaan UKM terhadap total kredit yang telah ditetapkan dari tahun 2015 paling rendah 5%, tahun 2016 paling rendah 10% , tahun 2017 paling rendah 15% dan sejak tahun 2018 paling rendah 20% .

Adanya laporan keuangan menjadi salah satu bentuk untuk menyampaikan informasi akuntansi baik kepada pemilik usaha maupun investor, sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut. Salmiah et al (2015) Adapun berbagai kendala atau kelemahan pelaku UKM dalam proses penyusunan atau penyajian laporan keuangan yaitu disebabkan masih minimnya pengetahuan serta pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Berdasarkan situasi yang dialami pelaku UKM untuk membantu mengurangi masalah kesulitan dalam pencatatan laporan keuangan, maka

pemerintah menetapkan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi sehingga sektor industri UKM dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah) SAK EMKM. Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang diratapkan pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018.

Penerapan standar akuntansi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) menjelaskan bahwa perubahan-perubahan pada SAK EMKM sebagai bentuk SAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. SAK EMKM ini adalah sebagai alternative standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan perkembangan yang dialami UMKM dalam melaporkan laporan keuangannya, telah dikeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). Olyvia et al (2019) Penerapan standar akuntansi ini dapat diharapkan memberi gambaran kinerja manajemen UMKM di masa lalu dan prospek di masa depan, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan oleh pengurus maupun oleh anggota UMKM dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan lain yang berhubungan dengan UMKM. Sejak berlakukannya SAK EMKM persepsi dari berbagai pihak muncul sebagai tanggapan atas tingkat efektifitas, efisiensi, tingkat kemudahan maupun kegunaan adanya standar yang baru.

Entitas yang dapat menggunakan standar ini yakni entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dengan adanya SAK EMKM ini kedepannya tentu sangat diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi financial specialist untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

Walaupun cukup ringkas, tidak banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini. Kehadiran standar ini dapat menjadi acuan yang lebih mudah bagi kalangan yang lebih luas untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diterima secara umum. Kenyataannya tingkat kebutuhan SAK EMKM bagi UMKM masih sangat rendah dan SAK EMKM juga masih dianggap memberatkan bagi Usaha Kecil dan Menengah.

Pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi keberlangsungan usahanya. Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan di dalam suatu usaha terkesan apa adanya. Hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan pengelola usaha kecil menjadi tidak terarah dan akan menyulitkan manajer dalam mengontrol tentang informasi akuntansinya. Inilah yang menjadi permasalahan UKM pada saat ini, khususnya di bidang keuangan. Permasalahan tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan UKM.

Pembuatan laporan keuangan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan UMKM melalui penerapan sistem pencatatan SAK EMKM dimaksudkan untuk mempermudah pemangku kepentingan UMKM saat membuat laporan keuangan tersebut. Pemangku kepentingan UMKM dapat menggunakan SAK sebagai petunjuk dalam menyusun laporan keuangan. Pemangku kepentingan UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan operasinya dengan menyusun laporan keuangan yang ditetapkan sesuai standar akuntansi. Laporan keuangan tersebut disusun menurut SAK EMKM untuk memberikan pelaporan keuangan bersifat akurat, mudah dipahami, relevan, dan berisi informasi yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Untuk memungkinkan pengembangan bisnis UKM untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Akses ke lembaga keuangan sangat penting bagi keberlangsungan UMKM, karena dengan akses tersebut UMKM dapat mengembangkan usaha dan mendapat suntikan dana dari lembaga keuangan. Salah satunya adalah dengan menyajikan laporan keuangan sebagai acuan bagi lembaga keuangan untuk menilai layak atau tidaknya UKM tersebut. Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Bertujuan agar perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri juga dapat diaudit dan mendapatkan opini review, sehingga perusahaan yang mereka kelola dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya.

Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) yang dilakukan oleh IAI untuk usaha kecil dan menengah Keberadaannya belum banyak diketahui oleh pemilik usaha kecil dan menengah serta kurangnya sosialisasi menjadi Faktor utama kurang dikenalnya SAK EMKM di lingkungan UKM.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur menyebut industri kecil menengah (IKM) batik mampu tumbuh 3-5 persen per tahun. Dengan jumlah 9.824 unit hingga 2018, IKM ini telah mampu menyerap 29 ribu tenaga kerja. Seluruh IKM batik itu tersebar di hampir seluruh Jawa Timur Menurut (JATIMNET.COM, Surabaya). Dari 38 kabupaten/kota, yang menonjol dalam hal kekhasan batik adalah Madura. Kemudian ada batik Tuban, Sidoarjo, Tulungagung dan Banyuwangi. "Sebenarnya setiap daerah punya kekhasan, tapi saat ini yang menonjol daerah-daerah itu,". (Drajat Irawan melalui selulernya, Minggu 14 April 2019).

Usaha Galeri Batik Murni yang terletak di jalan Halmahera, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun merupakan salah satunya adalah UKM yang bergerak dibidang industri tekstil. Perusahaan ini tidak memperhatikan sistem akuntansi yang benar, dimana proses pencatatan biaya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pencatatan biaya overhead pabrik dan biaya non produksi (beban penjualan umum dan biaya administrasi) lainnya seringkali diabaikan, sehingga biaya-biaya tersebut yang sebenarnya telah dikeluarkan tidak terhitung dan tidak tercatat pada laporan dan mengakibatkan laporan keuangan UKM tersebut tidak dapat memisahkan harta pribadi dan harta

hasil usaha. Hal tersebut menyebabkan manajemen tidak akurat dalam membuat perencanaan laba dan pengendalian biaya, selain itu manajemen tidak dapat membuat laporan keuangan secara tepat yang sesuai dengan pedoman atau standar yang telah ditentukan.

Manajemen dapat menetapkan harga jauh lebih mudah dan yakin kalau mereka memiliki informasi yang pasti mengenai biaya pekerjaan atau unit yang akan diproduksi. Madiun sebagai salah satu daerah di Jawa Timur lebih dikenal dengan industri brem dan sambal pecel, padahal di kota maupun kabupaten Madiun juga terdapat beberapa produsen batik skala usaha kecil menengah.

Berdasarkan Pemasalahan Diatas Sehingga Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah UKM telah menerapkan laporan keuangan yang berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah dalam menjalankan usahanya dan merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat membuat laporan keuangan berbasis SAK EMKM serta menganalisis upaya pengembangan yang dilakukannya. Laporan keuangan tersebut diharapkan pemilik UKM dapat mengevaluasi usahanya serta dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan tersebut sebagai suatu dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang dilakukannya. Untuk Menjawab Permasalahan Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik malakukan penelitian penelitian dengan judul ***“Analisis Penerapan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada UKM batik di Galeri Batik Murni)”***

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan pencatatan keuangan yang dilakukan pada UKM Galeri Batik Murni?
2. Apa Faktor Penghambat UKM Galeri Batik Murni dalam Menyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah?
3. Bagaimana Strategi UKM Galeri Batik Murni dalam menerapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Penerapan Keuangan yang di lakukan UKM Galeri Batik Murni
2. Untuk Mengetahui Faktor penghambat UKM Galeri Batik Murni dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah
3. Untuk Mengetahui Strategi apa saja yang UKM Galeri Batik Murni dalam menerapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah

1.4 Batasan Masalah

Penelitian dilakukan di UKM Galeri Batik Murni yang terletak di jalan Halmahera, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Penelitian ini hanya berfokus pada Penerapan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berguna kepada para pengusaha agar kedepannya pemilik usaha secara mandiri dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan juga diharapkan dapat menjadi saran pembangun bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, terkhusus untuk ilmu akuntansi keuangan. Serta dapat menjadi ruang belajar yang bernilai positif dan sangat membantu di dalam peningkatan kapasitas dan juga pengalaman yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan ilmu akuntansi.